

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN NAGEKEO
MENURUT PENGELUARAN
2016-2020**



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN NAGEKEO
MENURUT PENGELUARAN
2016-2020**



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN NAGEKEO
MENURUT PENGELUARAN 2016-2020**

ISBN : -
Nomor Katalog : 9302023.5318
Nomor Publikasi : 53180.2103
Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xiv + 69 halaman

Naskah :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagekeo

Gambar Kulit :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagekeo

Diterbitkan oleh :
©Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagekeo

Dicetak oleh:
PT. Arnoldus Nusa Indah

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Tim Penyusun

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN NAGEKEO
MENURUT PENGELUARAN 2016-2020**

Pengarah

Abdul Azis

Editor

Saturninus Raja Gati

Penulis dan Pengolah Data

Fajar Nur Fatah

Desain/Layout

Fajar Nur Fatah

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar, pendalaman sektor keuangan, penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran), serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut Pendapatan). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts* 2008 seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kritik dan saran konstruktif berbagai pihak kami harapkan untuk penyempurnaan penerbitan mendatang. Semoga publikasi ini mampu memenuhi kebutuhan data statistik, baik oleh instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi, maupun masyarakat luas.

Mbay, April 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Nagekeo,

Abdul Azis, S.ST.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB).....	3
1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB.....	6
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA.....	11
2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA (PK-RT).....	13
2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT).....	15
2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P).....	17
2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB).....	20
2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI).....	23
2.6 EKSPOR - IMPOR.....	26
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN NAGEKEO MENURUT PDRB PENGELUARAN 2015 -2019.....	27
3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN.....	29
3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN.....	37
3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah Tangga.....	37
3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT.....	39
3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah.....	40
3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto.....	42
3.2.5. Perubahan Inventori.....	43
3.2.6. Ekspor Barang dan Jasa.....	44
3.2.7. Impor Barang dan Jasa.....	45
BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN NAGEKEO 2016-2020.....	47
4.1 PDRB (NOMINAL).....	49
4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB.....	48
4.3 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN.....	49
4.4 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR).....	52
BAB V PENUTUP.....	53
LAMPIRAN.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020	30
Tabel 2.	PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020	31
Tabel 3.	Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020	34
Tabel 4.	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020	36
Tabel 5.	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020 ...	36
Tabel 6.	Perkembangan Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020	38
Tabel 7.	Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Nagekeo Tahun 2015-2019	39
Tabel 8.	Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020	40
Tabel 9.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020	39
Tabel 10.	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020	43
Tabel 11.	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020	44
Tabel 12.	Perkembangan Ekspor Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020	45
Tabel 13.	Perkembangan Impor Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020	46
Tabel 14.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020	49
Tabel 15.	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020	50
Tabel 16.	Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020	49
Tabel 17.	Incremental Capital Output Ratio Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020	52

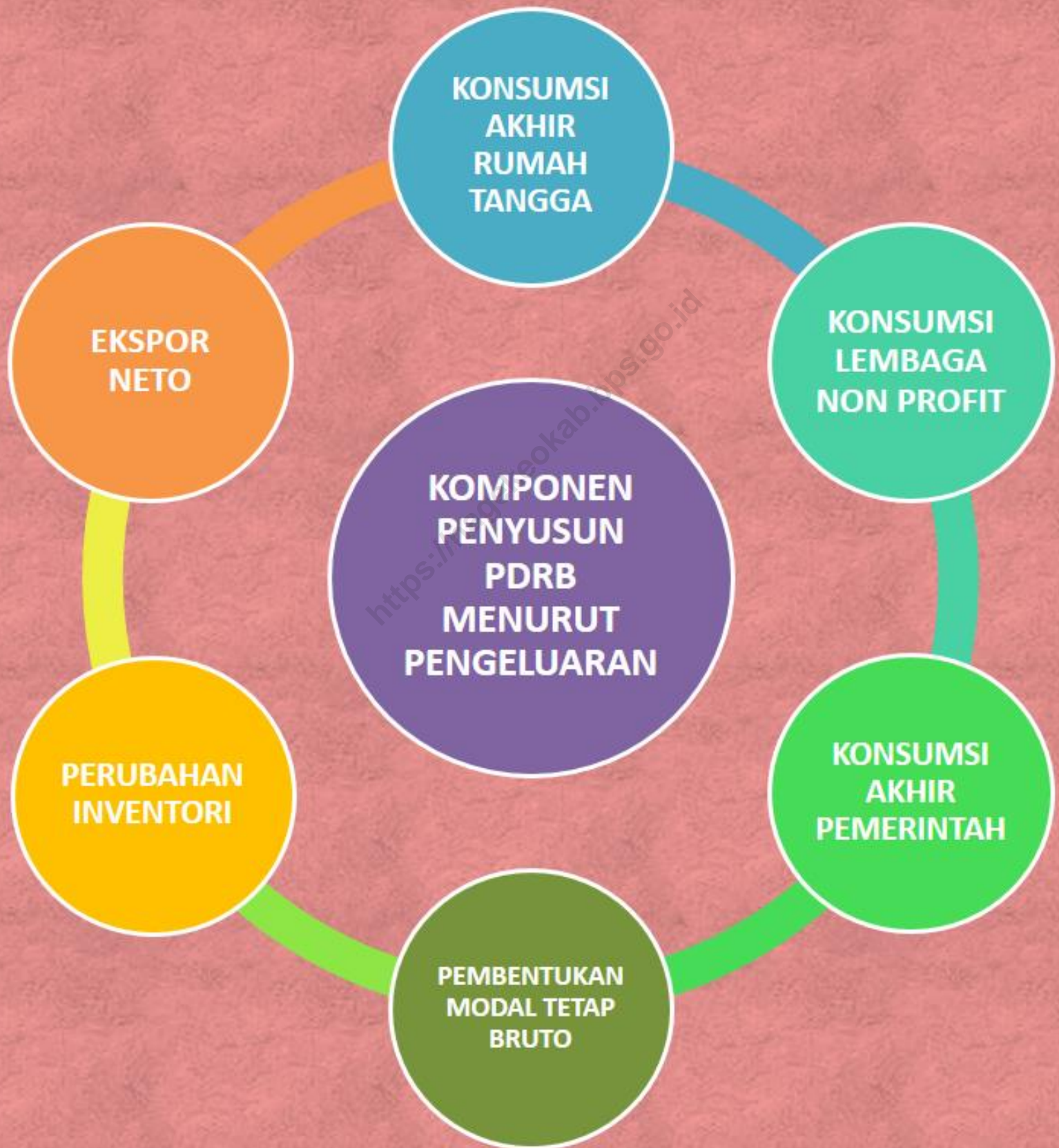
DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020	30
Grafik 2.	PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020	32
Grafik 3.	Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020	33
Grafik 4.	Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020	35

<https://nagekeokab.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020	59
Lampiran 2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020	58
Lampiran 3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020.....	59
Lampiran 4	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020.....	60
Lampiran 5	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020.....	61
Lampiran 6	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020.....	62
Lampiran 7	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020	63
Lampiran 8	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020.....	64



1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Meski demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

² *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan “riil”
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto” .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

⁴ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). CBR merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). MWS merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
 - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). RnD merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti RnD tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
 - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). MEE merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
 - e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
 - f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). CSD merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). ELA merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.

h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

<https://nagekeokab.bps.go.id>

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2



Konsumsi Akhir Rumah Tangga

- Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional
- Data Indeks Harga Konsumen
- Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun



Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit

- Hasil Survei Lembaga Non Profit
- Hasil Updating Lembaga Non Profit



Konsumsi Akhir Pemerintah

- Data Realisasi APBD Tahunan
- Hasil Survei Statistik Keuangan Daerah
- Data Gaji PNS



Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto

- Hasil Survei Pembentukan Modal Tetap Bruto Tahunan
- Data Statistik Pertanian



Perubahan Inventori

- Data Laporan Keuangan BUMD
- Data komoditas pertanian
- Indeks Harga Perdagangan Besar



Ekspor Neto (Ekspor - Impor)

- Data Statistik Ekspor Impor Barang
- Hasil Survei Simopel

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

⁵ Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perelngkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumahtangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metode Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumahtangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah tangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metode Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metode Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

$$\begin{aligned} \text{PK-P atas dasar harga Berlaku} = & \text{Output} - \\ & \text{Penjualan barang dan jasa} + \\ & \text{Social transfer in kind purchased market production} + \\ & \text{Output Bank Indonesia} \end{aligned}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-*deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

<https://nagekeokab.bps.go.id>

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);

2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v Metode estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

- ✓ Metode Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ Metode Tidak Langsung:

Pendekatan Supply : $\text{PMTB atas dasar harga Berlaku} = \text{Total Supply Barang} \times \text{Rasio PMTB}$

Pendekatan Ekstrapolasi : $\text{PMTB atas dasar harga Konstan (t)} = \text{PMTB atas dasar harga (t-1)} \times \text{Indeks Produksi (t)}$

<https://nagekeokab.bps.go.id>

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumahtangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

v Metode Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metode Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = Volume nventori (t) - Volume inventori (t-1)) x Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

b. Metode Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan = Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t) -
Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)

PI atas dasar harga Berlaku = PI atas dasar harga Konstan x IHPB rata-rata (t)

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Import ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

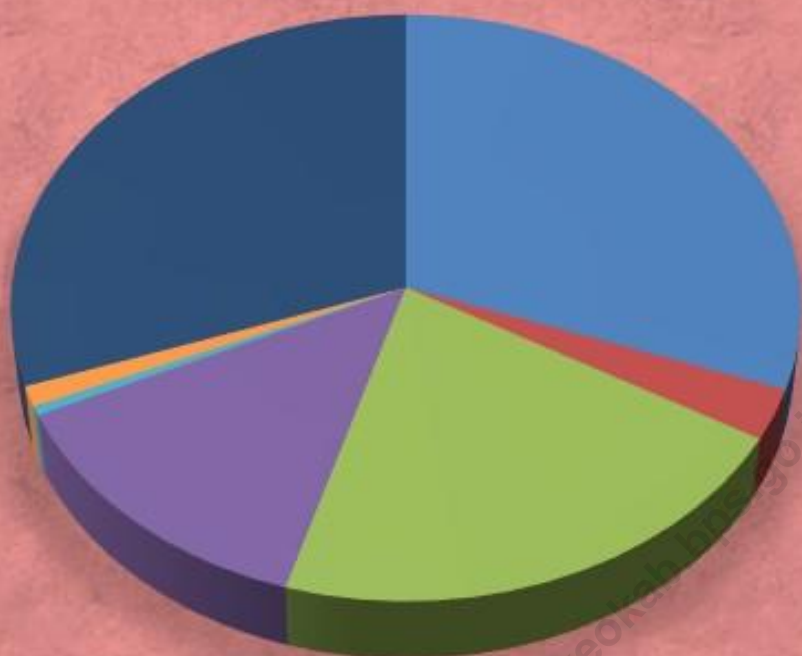
iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metode tidak langsung.

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN NAGEKEO MENURUT PDRB PENGELUARAN TAHUN 2015-2019

3

Distribusi PDRB Tahun 2020



- PK-RT
- PK-LNPRT
- PK-P
- PMTB
- PI
- Ekspor
- Impor

PDRB Menurut Pengeluaran ADHB



3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Ke dua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung berkembang baik, perekonomian Kabupaten Nagekeo periode 2015-2019 dapat tetap tumbuh di atas 4%, yakni sebesar 4,61 persen pada tahun 2015 hingga mencapai 4,23 persen di tahun 2019. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Namun, pada 2020 pertumbuhan ekonomi Nagekeo cenderung agak tertahan yakni hanya sebesar 0,63 persen. Tertekannya pertumbuhan ekonomi di 2020 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang memengaruhi semua sektor selama hampir satu tahun kalender.

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi yang paling terdampak secara volume oleh adanya pandemi yaitu kategori Penyedia Akomodasi dan Makan minum yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar -8,77 persen. Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagekeo ditopang pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (PK-RT) yang pada tahun 2020 menyumbang 73,89 persen terhadap pertumbuhan total PDRB menurut harga berlaku.

Pada periode tahun 2016-2020 PDRB Kabupaten Nagekeo atas dasar harga berlaku tidak mengalami peningkatan yang signifikan di 2020 meski di tahun-tahun sebelumnya meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 1.772,40 miliar rupiah (2016); 1.928,59 miliar rupiah (2017); 2.102,04 miliar rupiah (2018); 2.240,94 miliar rupiah (2019); dan . Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Nagekeo pada periode 2016-2020 dapat dilihat dari Tabel 1 dan Grafik 1.

Tabel 1 dan Grafik 1 menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Nagekeo ditopang oleh komponen konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Sementara komponen perubahan inventori, pembentukan modal tetap bruto dan ekspor pengaruhnya tidak begitu besar

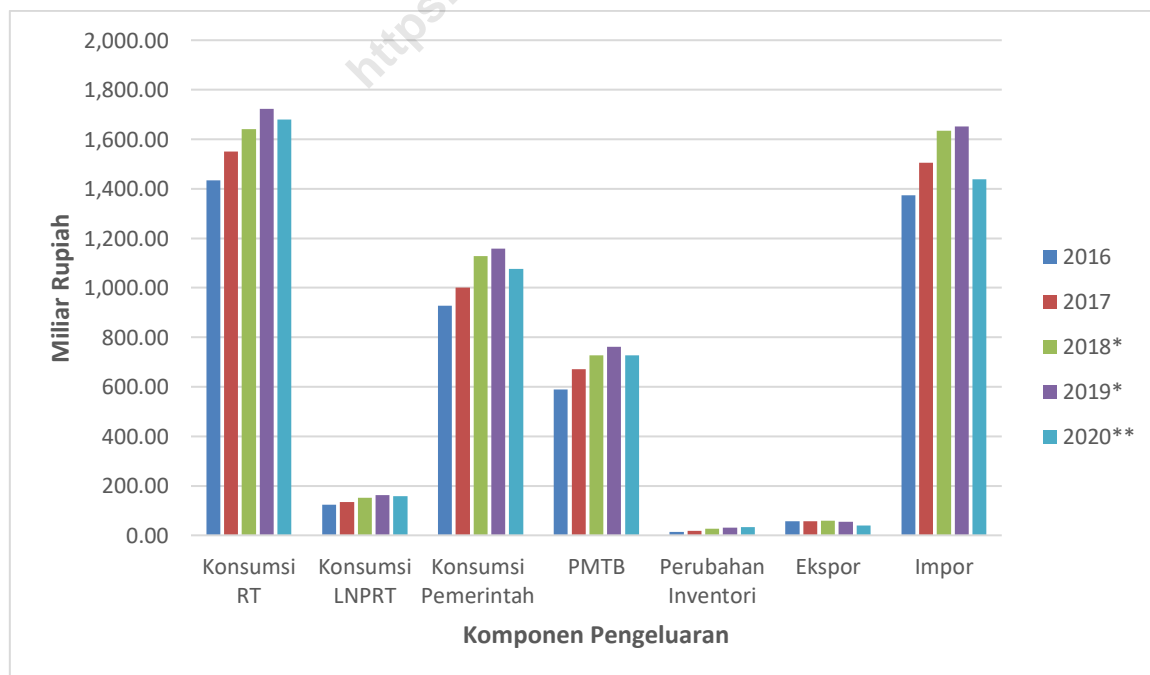
terhadap perekonomian kabupaten Nagekeo. Perubahan-perubahan yang terjadi pada pola konsumsi rumah tangga dapat menyebabkan perubahan yang besar pada kondisi perekonomian.

Tabel 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020

Komponen Pengeluaran (1)	2016	2017	2018	2019*	2020**
	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1.433,18	1.550,67	1.641,91	1.723,19	1.680,21
2. Konsumsi LNPRT	124,06	134,98	151,07	163,52	158,13
3. Konsumsi Pemerintah	926,57	1.000,92	1.128,25	1.157,91	1.075,78
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	590,10	671,04	726,53	762,29	726,55
5. Perubahan Inventori	14,33	18,27	27,77	30,78	33,30
6. Ekspor	56,93	57,68	59,84	54,80	39,33
7. Impor	1.372,77	1.504,97	1.633,34	1.651,57	1.439,22
Total PDRB	1.772,40	1.928,59	2.102,04	2.100,91	2.274,08

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Grafik 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020



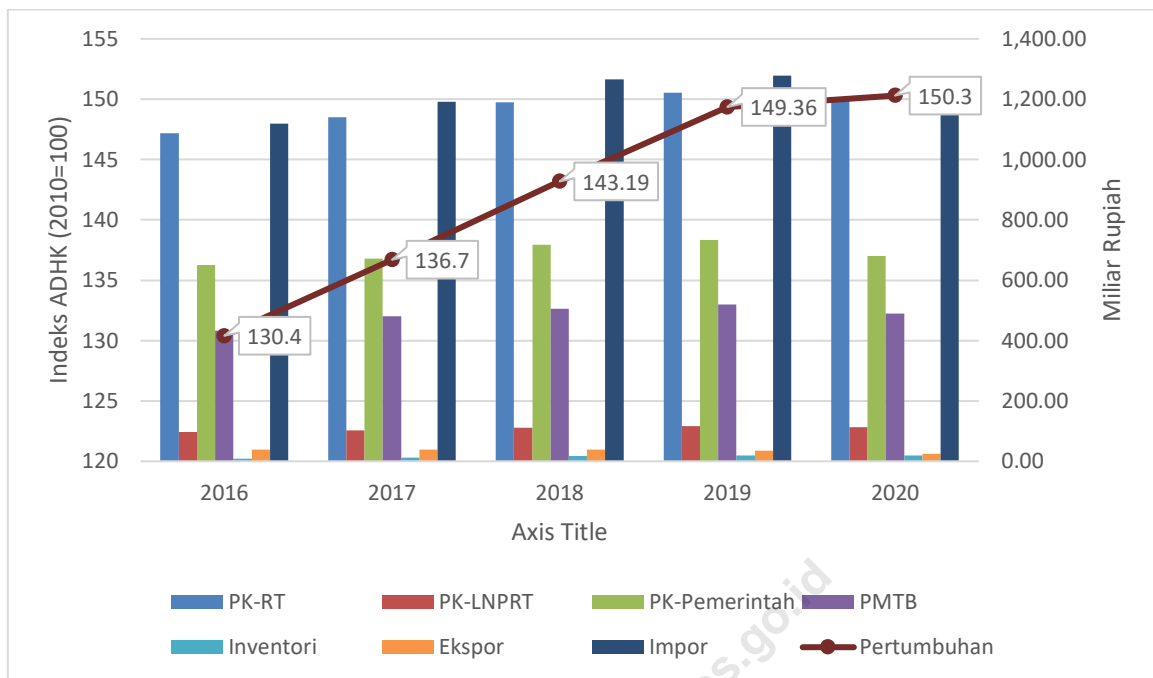
Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Nagekeo pada periode 2016-2020 dapat dilihat dari Tabel 2 dan Grafik 2 berikut ini:

Tabel 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020

Komponen Pengeluaran	(Miliar Rp)				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1.086,94	1.140,07	1.188,96	1.222,07	1.206,33
2. Konsumsi LNPR	97,33	102,32	111,78	117,22	112,27
3. Konsumsi Pemerintah	650,39	671,44	717,76	734,10	680,56
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	432,37	479,99	504,86	520,42	489,81
5. Perubahan Inventori	9,37	11,48	16,84	18,31	19,75
6. Ekspor	38,72	39,43	39,27	35,64	25,02
7. Impor	1.118,99	1.190,82	1.266,05	1.277,78	1.155,09
Total PDRB	1.196,14	1.253,90	1.313,44	1.369,99	1.378,67

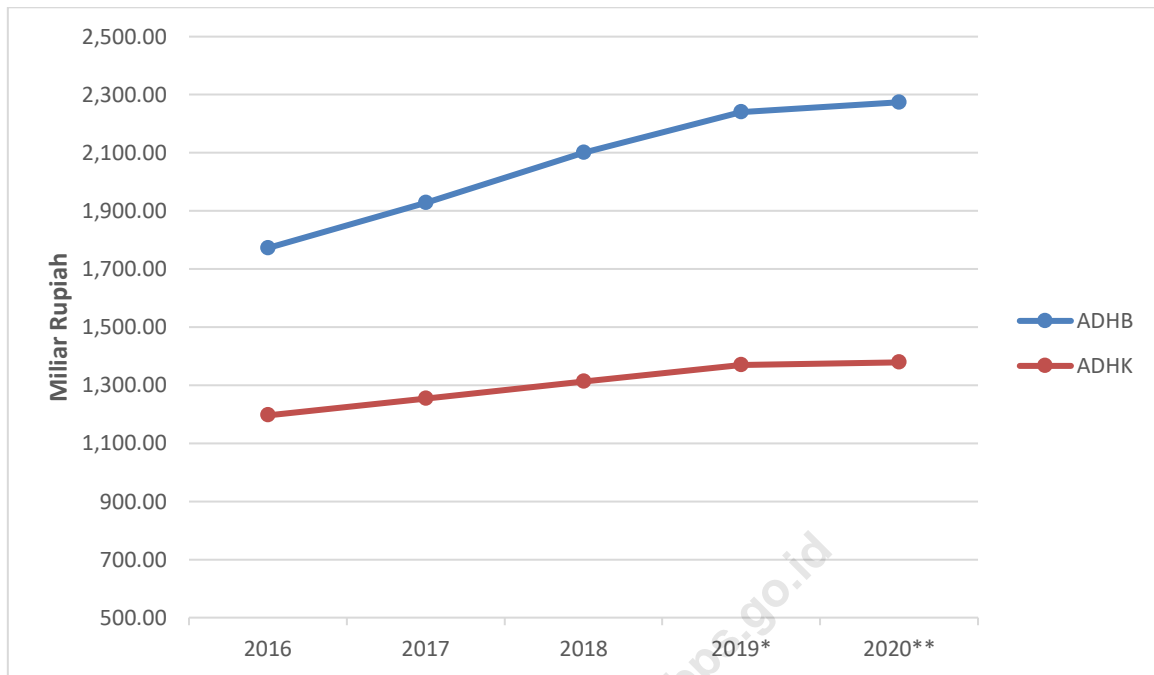
*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Grafik 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020



Dari Tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Nagekeo meningkat, yakni dari 1.086,94 miliar rupiah pada tahun 2016 menjadi 1.206,33 miliar rupiah pada tahun 2019. Sedangkan dari Grafik 2, terlihat bahwa indeks ADHK (2010=100) mengalami kenaikan dari 124,71 di 2015 menjadi 149,24 yang menandakan adanya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nagekeo, dengan pertumbuhan di kisaran 4 persen.

Grafik 3. Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020



Dari Grafik 3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut dipengaruhi baik oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan sehingga dapat dimaknai sebagai peningkatan kapasitas produksi. Sama halnya PDRB atas dasar harga berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan.

Tabel 3. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020

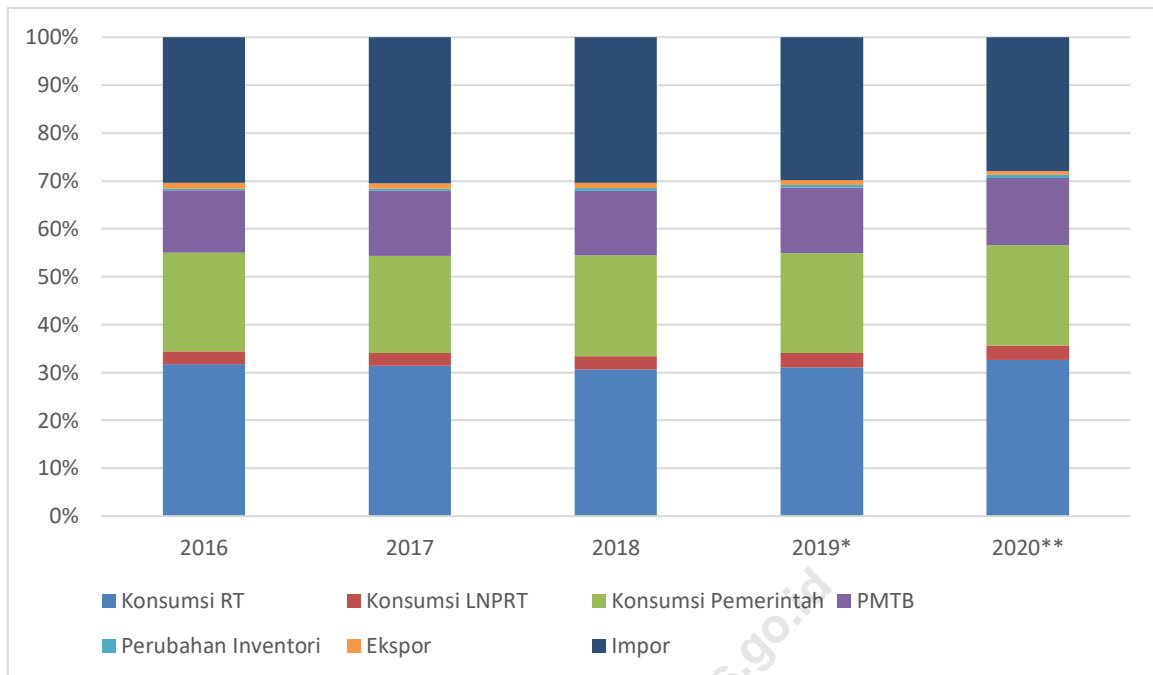
Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	80,86	80,40	78,11	76,90	73,89
2. Konsumsi LNPRT	7,00	7,00	7,19	7,30	6,95
3. Konsumsi Pemerintah	52,28	51,90	53,67	51,67	47,31
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	33,29	34,79	34,56	34,02	31,95
5. Perubahan Inventori	0,81	0,95	1,32	1,37	1,46
6. Ekspor	3,21	2,99	2,85	2,45	1,73
7. Impor	77,45	78,03	77,70	73,70	63,29
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI) dan Ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Dari Tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2016-2020, PDRB Kabupaten Nagekeo, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT). Pengeluaran untuk konsumsi pemerintah (PK-P) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 50 hingga 54 persen. Di sisi lain komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi relatif besar, yakni sekitar 73 hingga 79 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah (impor).

Grafik 4. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020



Kontribusi komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) berada pada rentang 28-35 persen. Di sisi lain, selama periode 2016-2020 perdagangan antar wilayah menunjukkan nilai ekspor yang selalu lebih rendah dibandingkan dengan nilai impor. Kecenderungan pada periode itu menunjukkan posisi “defisit” transaksi berjalan.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari Tabel 4, selama periode tahun 2016-2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagekeo mengalami fluktuasi, yakni dari sebesar 4,23 hingga 0,63 persen.

Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020

(Persen)					
Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga	4,09	4,89	4,29	2,79	-1,29
Konsumsi LNPRT	0,28	5,13	9,25	4,86	-4,21
Konsumsi Pemerintah	0,46	3,24	6,90	2,28	-7,29
Pembentukan Modal Tetap Bruto	14,28	11,01	5,18	3,08	-5,88
Ekspor	(61,01)	1,83	-0,39	-9,24	-29,79
Impor	(2,26)	6,42	6,32	0,93	-9,60
Total PDRB	4,56	4,83	4,75	4,31	0,63

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020

(Persen)					
Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga	131,85	136,02	138,10	141,01	139,28
Konsumsi LNPRT	127,45	131,91	135,14	139,50	140,83
Konsumsi Pemerintah	142,46	149,07	157,19	157,73	158,07
Pembentukan Modal Tetap Bruto	136,48	139,80	143,91	146,47	148,33
Ekspor	147,04	146,29	152,39	153,78	157,17
Impor	122,68	126,38	129,01	129,25	124,60
Total PDRB	148,18	153,81	160,04	163,57	164,95

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Sementara itu, indeks implisit⁶ PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumahtangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) menunjukkan peningkatan. Secara kumulatif kenaikan harga PDRB yang terjadi sepanjang tahun 2010 hingga tahun 2020 adalah sebesar 64,95 persen.

⁶ Indeks perkembangan

3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumahtangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Nagekeo untuk periode 2016-2020.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Nagekeo, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Nagekeo maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumahtangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumahtangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumahtangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2016-2020 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami (peningkatan/penurunan) signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 6. Perkembangan Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga (Miliar Rp)					
a. ADHB	1.433,18	1.550,67	1.641,91	1.723,19	1.680,21
b. ADHK (2010)	1.086,94	1.140,07	1.188,96	1.222,07	1.206,34
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	80,86	80,40	78,11	76,90	73,89
Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga per Kapita/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	10.142,12	10.859,03	11.369,78	11.817,24	11.416,02
b. ADHK 2010	7.691,90	7.983,68	8.233,22	8.380,67	8.196,36
Pertumbuhan ⁷					
a. Total konsumsi Rumah Tangga	4,09	4,89	4,70	3,94	-3,40
b. Perkapita	2,82	3,79	3,13	1,79	-2,20
Jumlah penduduk (ribu orang)	141,31	142,80	144,41	145,82	147,18

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Selama periode 2016-2020 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB sangat dominan, yaitu berkisar antara 74 persen sampai dengan 81 persen. Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 80,86 persen dan terendah pada tahun 2020 sebesar 73,89 persen.

Dengan kondisi perekonomian yang terus bertumbuh, biasanya institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini mendorong naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi per-kapita secara "riil" meningkat pada kisaran 1,53 persen s.d. 3,79 persen. Peningkatan tersebut tentu berpengaruh pada struktur konsumsi rumah tangga, seperti terlihat pada tabel berikut:

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

Tabel 7. Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020⁸
(Persen)

Kelompok Konsumsi	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	31,98	31,92	31,71	31,70	31,95
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,26	4,27	4,17	3,98	3,26
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	12,27	12,56	12,38	12,43	12,84
d. Kesehatan & Pendidikan	6,97	6,95	6,78	6,76	7,13
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	20,94	20,17	18,73	17,74	15,62
f. Hotel & Restoran	2,21	2,31	2,60	2,51	1,38
g. Lainnya	2,22	2,22	1,74	1,77	1,71
Total Konsumsi rumah Tangga	80,86	80,40	78,11	76,90	73,89

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Secara rata-rata, dari tahun 2016 sampai dengan 2020, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Kabupaten Nagekeo bahwa konsumsi bukan makanan masih lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cukup stagnan selama periode 2016-2020, yaitu berkisar antara 31 persen sampai 32 persen.

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut diantaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2016 konsumsi LNPRT sebesar 124,06 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya yaitu 134,98 miliar rupiah (2017); 151,07 miliar rupiah (2018); 163,52 miliar rupiah (2019); dan 158,12 miliar

⁸ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

rupiah (2020) Pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT tahun dasar 2010 relatif bervariasi. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh pola kegiatan lembaga non profit yang melayani rumah tangga.

Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	124,06	134,98	151,07	163,52	158,12
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	97,33	102,32	111,79	117,22	112,28
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	7,00	7,00	7,19	7,30	6,95
Pertumbuhan (ADHK 2010)	0,28	5,13	9,25	4,86	-4,21

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Tabel 9. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	926,57	1.000,92	1.128,25	1.157,91	1.075,78
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	650,39	671,44	717,76	734,10	680,56
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	52,28	51,90	53,67	51,67	47,31
Konsumsi Pemerintah per kapita (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	6.557,01	7.009,24	7.812,82	7.940,68	7.309,28
b. ADHK 2010	4.602,61	4.701,96	4.970,29	5.034,29	4.624,00
Konsumsi Pemerintah per pegawai pemerintah (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	262.261,80	301.119,13	348.871,37	345.335,52	276.692,39
b. ADHK 2010	184.091,18	201.997,59	221.941,87	218.938,26	175.041,15
Pertumbuhan ⁹ (<i>Persen</i>)					
a. Total konsumsi pemerintah	0,46	3,24	6,90	2,28	-7,29
b. Konsumsi pemerintah per kapita	-0,77	2,16	5,71	1,29	-8,15
c. Konsumsi per pegawai pemerintah	2,45	9,73	9,87	-1,35	-20,05
Jumlah Pegawai Pemerintah ¹⁰	3.533	3.324	3.234	3.353	3.888
Jumlah penduduk (<i>ribu org</i>)	141,31	142,80	144,41	145,82	147,18

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2016 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 926,57 miliar rupiah dan meningkat menjadi 1.075,78 miliar rupiah pada tahun 2020. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada setiap tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas. Proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB berfluktuasi di rentang angka 51 hingga 53 persen.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total

⁹ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

¹⁰ Tidak termasuk polisi dan militer

menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per kapita. Pada tahun 2016 konsumsi pemerintah per kapita atas dasar harga berlaku sebesar 6,55 juta rupiah dan terus meningkat pada tahun-tahun setelah itu (Tabel 9) hingga mencapai 7,31 juta rupiah pada tahun 2020.

Rata-rata konsumsi pemerintah per kapita atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2016 yang mengalami penurunan 0,77 persen dibandingkan tahun 2015 karena tingkat pertumbuhan penduduk lebih tinggi dibandingkan laju pengeluaran pemerintah.

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2016 konsumsi pemerintah per pegawai pemerintah sebesar 262,26 juta rupiah, kemudian terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya (Tabel 9). Pada tingkat harga konstan 2010, indikator pemerataan menurut pegawai ini juga menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Persentase kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2017 dan 2018, yaitu berturut-turut sebesar 9,73 dan 9,88 persen.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” ini menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah.

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)¹¹. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di bawah ini menjelaskan bahwa, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2016-2020 fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yang mencapai 14,28 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu negatif sebesar -5,88 persen.

¹¹ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

Tabel 10. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	590,10	671,04	726,53	762,29	726,54
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	432,37	479,99	504,86	520,42	489,81
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	33,29	34,79	34,56	34,02	31,95
Struktur PMTB ¹²					
a. Bangunan (Miliar Rp)	350,37	391,09	420,10	456,91	413,77
Persentase (%)	59,37	58,28	57,82	59,94	56,95
b. Non Bangunan (Miliar Rp)	239,73	279,95	306,42	305,38	312,78
Persentase (%)	40,63	41,72	42,18	40,06	43,05
Total PMTB (Miliar Rp)	590,10	671,04	726,53	762,29	726,54
Persentase (%)	100	100	100	100	100
Pertumbuhan ¹³ (%)					
a. Bangunan	18,36	9,04	3,35	5,66	-9,64
b. Non Bangunan	8,12	14,28	8,07	-0,81	0,15
Total PMTB	14,28	11,01	5,18	3,08	-5,88

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap. Proporsi non bangunan terhadap total PMTB relatif stabil selama periode 2015–2019 (Tabel 10). Ditinjau dari sisi pertumbuhan subkomponen bangunan menunjukkan pola yang sangat variatif antar tahunnya. Pertumbuhan subkomponen bangunan pada tahun 2016 adalah sebesar 14,26 persen kemudian meningkat tajam menjadi 18,36 persen pada tahun 2016. Pada tahun 2017, pertumbuhan subkomponen tersebut mengalami perlambatan. Sedangkan pada komponen non bangunan juga mengalami fluktuasi pertumbuhan bahkan mengalami pertumbuhan negatif 0,33 persen pada tahun 2015. Kondisi ini menggambarkan bahwa upaya pembentukan kapital untuk menunjang pertumbuhan ekonomi belum terlaksana dengan baik dari waktu ke waktu.

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi,

¹² Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

¹³ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 11. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	14,33	18,27	27,77	30,78	33,29
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	9,37	11,48	59,84	54,81	39,33
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	0,81	0,95	1,32	1,37	1,46

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis dengan rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya.

Pada tahun 2016 perubahan inventori atas dasar harga berlaku sebesar 14,33 miliar rupiah, berfluktuasi di tahun berikutnya dan kembali ke angka 33,29 miliar pada 2020. Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kabupaten Nagekeo berada sekitar 1 hingga 2 persen dari total PDRB.

3.2.6. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Nagekeo, tetapi dikonsumsi

oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Tabel 12. Perkembangan Ekspor Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020

U r a i a n	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	56,93	57,68	59,84	54,81	39,33
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	38,72	39,43	39,27	35,64	25,02
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	3,21	2,99	2,85	2,45	1,73
Pertumbuhan ¹⁴	61,01	1,83	-0,39	-9,24	-29,79

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Secara total, dalam kurun waktu 2016-2020 nilai ekspor barang dan jasa menunjukkan penurunan setiap tahun. Pada tahun 2015 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 131,72 miliar rupiah dan terus menurun menjadi sebesar 57,89 miliar rupiah pada tahun 2019. Sejalan dengan nilai ekspor atas dasar harga berlaku, nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang cenderung menurun dari 56,93 miliar rupiah pada tahun 2016 menjadi 39,33 miliar rupiah pada tahun 2020.

3.2.7. Impor Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Nagekeo. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi total konsumsi akhir domestik dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor.

¹⁴ Diturunkan dari perhitungan PDRB ADHK 2010

Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Nagekeo di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Nagekeo terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri.

Data pada Tabel 13 di bawah ini menunjukkan bahwa secara total nilai impor barang dan jasa Kabupaten Nagekeo meningkat (baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010) dalam kurun tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 nilai impor barang dan jasa atas dasar harga berlaku mencapai 1.118,99 miliar rupiah dan terus meningkat hingga menjadi sebesar 1.155,10 miliar rupiah pada tahun 2020. Sementara itu proporsi impor terhadap total PDRB memiliki kecenderungan menurun dari tahun 2016 yang dengan rasio 77,45 persen hingga mencapai 63,29 persen pada tahun 2020 terhadap total perekonomian.

Tabel 13. Perkembangan Impor Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020

U r a i a n	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	1.372,77	1.504,97	1.633,34	1.651,57	1.439,22
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	1.118,99	1.190,82	1.266,05	1.277,78	1.155,10
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	77,45	78,03	77,70	73,70	63,29
Pertumbuhan ¹⁵	-2,26	6,42	6,32	0,93	-9,60

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

¹⁵ Diturunkan dari perhitungan PDRB ADHK 2010

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2015-2019

4

PDRB ADHB PER KAPITA

2020

Rp 15,5 juta

2019

Rp 15,4 juta

2018

Rp 14,5 juta

2017

Rp 13,5 juta

2016

Rp 12,5 juta

2016

Rp 8,5 juta

2017

Rp 8,8 juta

2018

Rp 9,1 juta

2019

Rp 9,4 juta

2020

Rp 9,4 juta

PDRB ADHK PER KAPITA

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Nagekeo, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita.

Secara umum, PDRB per kapita Kabupaten Nagekeo menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Nagekeo rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut. Sementara itu pertumbuhan per kapita secara “riil” berada pada kisaran 3 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata 1 persen setiap tahunnya. Dengan demikian pertumbuhan per kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas.

Tabel 14. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (<i>Miliar Rp</i>)					
- ADHB	1.772,40	1.928,59	2.102,04	2.240,94	2.274,08
- ADHK 2010	1.196,14	1.253,90	1.313,44	1.369,99	1.378,67
PDRB per kapita (<i>Ribu Rp</i>)					
- ADHB	12.542,64	13.505,53	14.556,06	15.367,85	15.451,01
- ADHK 2010	8.464,65	8.780,81	9.095,22	9.395,08	9.367,24
Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010	3,28	3,74	3,58	3,30	-0,30
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	141,31	142,80	144,41	145,82	147,18
Pertumbuhan	1,24	1,05	1,13	0,98	0,93

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 15. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
Rumah tangga	1.433,18	1.550,67	1.641,91	1.723,19	1.680,21
LNPRT	124,06	134,98	151,07	163,52	158,12
Pemerintah	926,57	1.000,92	1.128,25	1.157,91	1.075,78
Jumlah (Miliar Rp)	2.483,81	2.686,57	2.921,23	3.044,62	2.914,11
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	1.772,40	1.928,59	2.102,04	2.240,94	2.274,07
Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB (Persen)	140,14	139,30	138,97	135,86	128,15

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Tabel 15 di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2016-2020, produk (barang dan jasa) yang digunakan untuk konsumsi akhir, baik oleh rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah selalu lebih besar (lebih dari 100 persen) dibandingkan dengan nilai total PDRB yang dihitung berdasarkan harga berlaku, yaitu rata-rata proporsi setiap tahunnya sebesar 136,48 persen. Hal ini berarti bahwa konsumsi akhir selalu lebih besar daripada produk yang dihasilkan oleh domestik sehingga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir tersebut diperlukan produk impor dari luar wilayah.

4.3 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk barang dan jasa yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Dari Tabel 16, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik selama periode 2016-2020, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar daerah Nagekeo, yaitu dengan rata-rata 42,97 persen setiap tahunnya. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 57,03 persen setiap tahunnya dari hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan akhir masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 3.145,17 miliar rupiah (2016) menjadi sebesar 3.881,41 miliar rupiah (2020).

Tabel 16. Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Penyediaan					
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	1.772,40	1.928,59	2.102,04	2.240,94	2.274,07
Persentase (Persen)	56,35	56,17	56,27	57,74	58,59
Total Impor (ADHB) (Miliar Rp)	1.372,77	1.504,97	1.633,34	1.651,57	1.439,22
Persentase (Persen)	43,65	43,83	43,73	42,26	41,41
Total Permintaan Akhir (ADHB) (Miliar Rp)	3.145,17	3.433,56	3.735,38	3.881,41	3.881,41
Persentase (Persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Di sisi lain “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar 1.772,40 miliar rupiah (2016); 1.928,59 miliar rupiah (2017); 2.100,91 miliar rupiah (2018); 2.240,86 miliar rupiah (2019); dan 2.274,07 miliar rupiah (2020). Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor, dengan nilai masing-masing tahun sebesar 1.372,77 miliar rupiah (2016); 1.504,97 miliar rupiah (2017); 1.625,49 miliar rupiah (2018); 1.640,55 miliar rupiah (2019); dan 1.439,22 miliar rupiah (2020).

4.4 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah *output* (keluaran). Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan *output* adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap *output* atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai *output* (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

dimana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

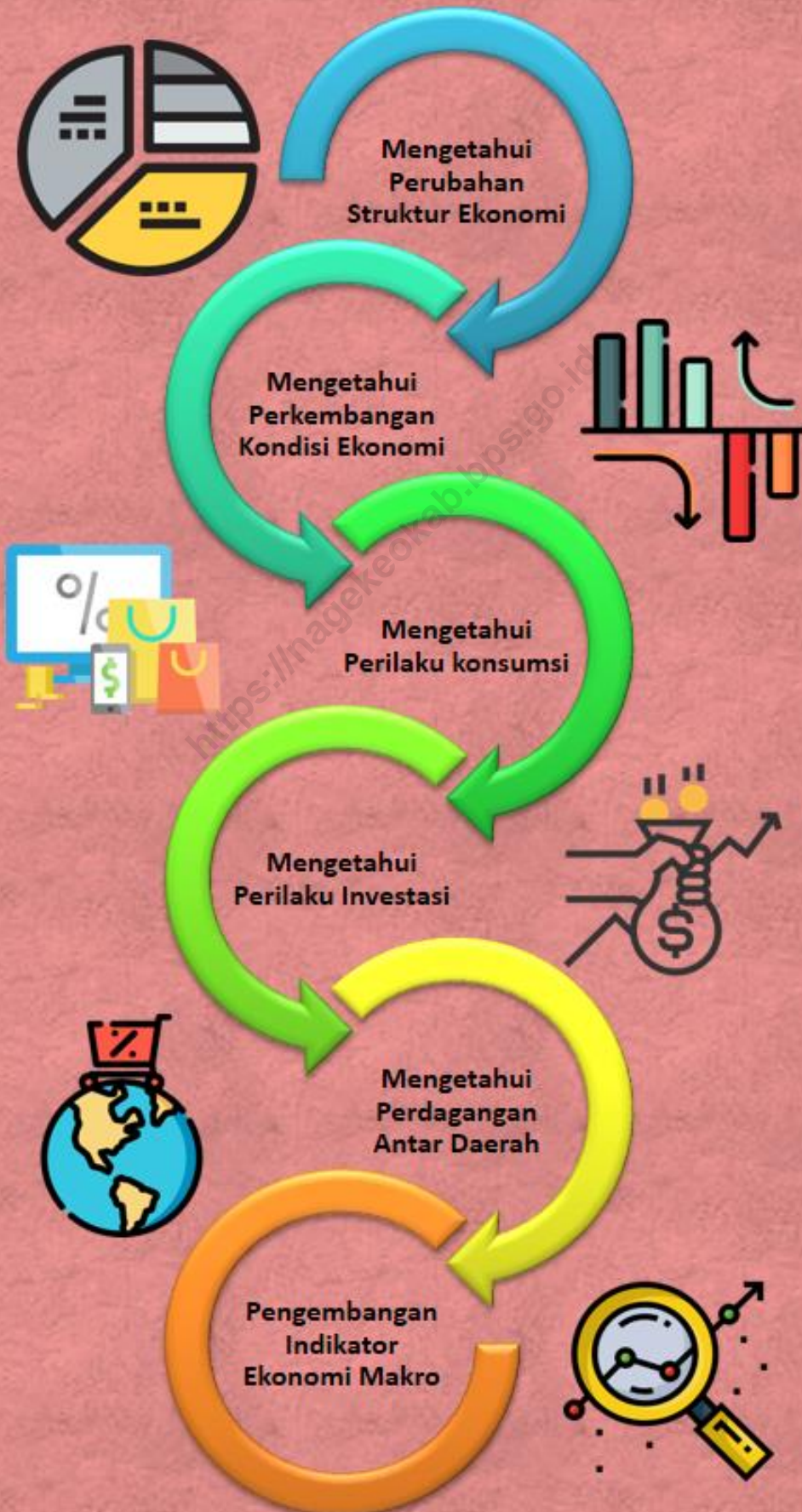
Tabel 17. Incremental Capital Output Ratio Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (Miliar rupiah)	1.196,14	1.253,90	1.313,44	1.369,99	1.378,67
Perubahan (Miliar rupiah)	52,20	57,76	59,43	55,61	8,68
PMTB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	432,37	479,99	504,86	520,42	489,81
ICOR	8,28	8,31	8,48	9,20	56,43

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Data di atas menunjukkan bahwa besaran ICOR periode 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan dari sebesar 8,28 (2016) menjadi 9,22 (2019). Pada tahun 2020 bahkan nilai ICOR mencapai 56,43, kemungkinan disebabkan oleh adanya pandemi sehingga nilainya tidak wajar seperti tahun-tahun biasa. Nilai ICOR sebesar 56,43 pada tahun 2020 menunjukkan bahwa untuk menaikkan *output* (nilai keluaran) perekonomian setiap satu rupiah dibutuhkan tambahan investasi senilai 56,43 rupiah.

MANFAAT PDRB MENURUT PENGELUARAN



1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2016-2020 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Nagekeo pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2016-2020, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Nagekeo terhadap ekonomi luar daerah.

LAMPIRAN

<https://hagekeokab.bps.go.id>

Lampiran 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.433.183,66	1.550.665	1.641.910,49	1.723.199,41	1.680.213,08
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	566.891,89	615.679,62	666.613,14	710.342,00	726.477,68
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	75.442,67	82.305,76	87.648,00	89.298,81	74.114,49
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	217.497,40	242.255,60	260.225,99	278.557,88	291.896,24
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	123.596,69	133.962,30	142.584,51	151.559,94	162.190,44
1.e. Trans., Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	371.213,96	389.046,69	393.635,24	397.621,37	355.259,95
1.f. Hotel dan Restoran	39.129,20	44.632,08	54.670,31	56.184,68	31.303,44
1.g. Lainnya	39.411,86	42.783,35	36.533,31	39.634,75	38.970,82
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	124.056,56	134.979,65	151.072,93	163.520,84	158.124,95
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	926.570,94	1.000.922,06	1.128.251,88	1.157.911,90	1.075.782,07
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	590.098,77	671.041,07	726.535,50	762.293,82	726.547,87
4.a. Bangunan	350.366,10	391.089,40	420.108,95	456.908,15	413.767,33
4.b. Non-Bangunan	239.732,67	279.951,67	306.426,55	305.385,68	312.780,54
5. Perubahan Inventori	14.325,76	18.273,61	27.770,67	30.783,36	33.299,17
6. Ekspor	56.930,31	57.677,68	59.843,45	54.808,45	39.330,65
7. Impor	1.372.770,28	1.504.969,47	1.633.340,83	1.651.577,00	1.439.218,98
PDRB	1.772.395,72	1.928.589,99	2.102.044,11	2.240.940,81	2.274.078,80

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Lampiran 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.086.942,49	1.140.066,37	1.188.962,62	1.222.075,51	1.206.336,90
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	376.468,98	397.161,04	416.083,42	436.246,22	441.205,26
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	49.169,22	51.553,71	52.602,17	52.817,47	41.947,74
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	190.494,43	199.673,95	214.892,78	228.515,16	237.850,15
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	93.335,58	98.209,48	102.982,93	107.421,51	116.462,57
1.e. Trans., Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	324.442,56	338.525,33	350.454,07	342.743,27	322.758,57
1.f. Hotel dan Restoran	21.913,73	23.365,70	25.824,77	26.361,56	19.900,44
1.g. Lainnya	31.117,99	31.577,16	26.122,49	27.970,33	26.212,17
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	97.334,65	102.323,82	111.789,85	117.220,08	112.279,38
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	650.394,15	671.435,33	717.767,89	734.104,28	680.560,44
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	432.369,21	479.987,93	504.860,55	520.426,45	489.814,12
4.a. Bangunan	269.447,31	293.794,18	303.647,15	320.848,17	289.928,35
4.b. Non-Bangunan	162.921,90	186.193,75	201.213,40	199.578,27	199.885,76
5. Perubahan Inventori	9.367,82	11.482,14	16.842,84	18.314,31	19.754,60
6. Ekspor	38.717,70	39.425,92	39.270,71	35.641,32	25.024,94
7. Impor	1.118.990,05	1.190.817,26	1.266.054,15	1.277.786,44	1.155.099,08
PDRB	1.196.135,96	1.253.904,25	1.313.440,31	1.369.995,52	1.378.671,305

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Lampiran 3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	80,86	80,40	78,11	76,90	73,89
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	31,98	31,92	31,71	31,70	31,95
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	4,26	4,27	4,17	3,98	3,26
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	12,27	12,56	12,38	12,43	12,84
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	6,97	6,95	6,78	6,76	7,13
1.e. Trans., Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	20,94	20,17	18,73	17,74	15,62
1.f. Hotel dan Restoran	2,21	2,31	2,60	2,51	1,38
1.g. Lainnya	2,22	2,22	1,74	1,77	1,71
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7,00	7,00	7,19	7,30	6,95
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	52,28	51,90	53,67	51,67	47,31
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	33,29	34,79	34,56	34,02	31,95
4.a. Bangunan	19,77	20,28	19,99	20,39	18,19
4.b. Non-Bangunan	13,53	14,52	14,58	13,63	13,75
5. Perubahan Inventori	0,81	0,95	1,32	1,37	1,46
6. Ekspor	3,21	2,99	2,85	2,45	1,73
7. Impor	77,45	78,03	77,70	73,70	63,29
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Lampiran 4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nagekeo Tahun 2015- 2019

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,09	4,89	4,29	2,79	(1,29)
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	5,73	5,50	4,76	4,85	1,14
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	4,02	4,85	2,03	0,41	(20,58)
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	(1,75)	4,82	7,62	6,34	4,09
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	5,90	5,22	4,86	4,31	8,42
1.e. Trans., Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5,31	4,34	3,52	(2,20)	(5,83)
1.f. Hotel dan Restoran	6,43	6,63	10,52	2,08	(24,51)
1.g. Lainnya	3,07	1,48	(17,27)	7,07	(6,29)
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,28	5,13	9,25	4,86	(4,21)
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,46	3,24	6,90	2,28	(7,29)
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	14,28	11,01	5,18	3,08	(5,88)
4.a. Bangunan	18,36	9,04	3,35	5,66	(9,64)
4.b. Non-Bangunan	8,12	14,28	8,07	(0,81)	0,15
5. Perubahan Inventori	(58,26)	22,57	46,69	8,74	7,86
6. Ekspor Luar Negeri	(61,01)	1,83	(0,39)	(9,24)	(29,79)
7. Impor Luar Negeri	(2,26)	6,42	6,32	0,93	(9,60)
PDRB	4,56	4,83	4,75	4,31	0,63

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Lampiran 5 Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	178,77	193,42	204,80	214,94	209,58
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	180,36	195,88	212,08	226,00	231,13
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	215,78	235,41	250,69	255,41	211,98
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	159,73	177,91	191,11	204,57	214,37
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	179,96	195,05	207,60	220,67	236,15
1.e. Trans., Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	176,15	184,61	186,79	188,68	168,58
1.f. Hotel dan Restoran	252,43	287,93	352,69	362,46	201,94
1.g. Lainnya	184,75	200,55	171,25	185,79	182,68
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	193,91	210,98	236,13	255,59	247,16
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	211,20	228,15	257,17	263,93	245,21
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	239,59	272,45	294,98	309,50	294,99
4.a. Bangunan	246,76	275,44	295,88	321,80	291,41
4.b. Non-Bangunan	229,83	268,39	293,77	292,77	299,86
5. Perubahan Inventori	35,56	45,36	68,93	76,41	82,66
6. Ekspor Luar Negeri	158,13	160,21	166,23	152,24	109,25
7. Impor Luar Negeri	193,44	212,07	230,16	232,73	202,80
PDRB	193,22	210,25	229,16	244,30	247,91

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Lampiran 6 Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	135,58	142,21	148,31	152,44	150,48
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	119,78	126,36	132,38	138,80	140,37
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	140,64	147,46	150,46	151,07	119,98
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	139,90	146,64	157,82	167,82	174,68
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	135,90	143,00	149,95	156,41	169,58
1.e. Trans., Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	153,95	160,63	166,29	162,63	153,15
1.f. Hotel dan Restoran	141,37	150,74	166,60	170,07	128,38
1.g. Lainnya	145,87	148,02	122,45	131,11	122,87
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	152,14	159,94	174,74	183,22	175,50
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	148,25	153,05	163,61	167,34	155,13
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	175,55	194,88	204,98	211,30	198,87
4.a. Bangunan	189,77	206,92	213,86	225,97	204,20
4.b. Non-Bangunan	156,19	178,50	192,90	191,33	191,63
5. Perubahan Inventori	23,25	28,50	41,81	45,46	49,03
6. Ekspor	107,54	109,51	109,08	99,00	69,51
7. Impor	157,68	167,80	178,40	180,05	162,77
PDRB	130,40	136,70	143,19	149,36	150,30

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Lampiran 7 Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	131,85	136,02	138,10	141,01	139,28
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	150,58	155,02	160,21	162,83	164,66
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	153,43	159,65	166,62	169,07	176,68
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	114,18	121,33	121,10	121,90	122,72
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	132,42	136,40	138,45	141,09	139,26
1.e. Trans., Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	114,42	114,92	112,32	116,01	110,07
1.f. Hotel dan Restoran	178,56	191,02	211,70	213,13	157,30
1.g. Lainnya	126,65	135,49	139,85	141,70	148,67
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	127,45	131,91	135,14	139,50	140,83
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	142,46	149,07	157,19	157,73	158,07
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	136,48	139,80	143,91	146,47	148,33
4.a. Bangunan	130,03	133,12	138,35	142,41	142,71
4.b. Non-Bangunan	147,15	150,36	152,29	153,02	156,48
5. Perubahan Inventori	152,93	159,15	164,88	168,08	168,56
6. Ekspor Luar Negeri	147,04	146,29	152,39	153,78	157,17
7. Impor Luar Negeri	122,68	126,38	129,01	129,25	124,60
PDRB	148,18	153,81	160,04	163,57	164,95

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Lampiran 8 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,05	3,16	1,53	2,11	(1,22)
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	12,09	2,95	3,35	1,63	1,12
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	1,49	4,05	4,37	1,47	4,50
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	(1,21)	6,26	(0,19)	0,66	0,68
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,20	3,01	1,50	1,90	(1,29)
1.e. Trans., Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	(4,38)	0,44	(2,26)	3,29	(5,12)
1.f. Hotel dan Restoran	13,91	6,98	10,83	0,68	(26,20)
1.g. Lainnya	5,09	6,98	3,22	1,32	4,92
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,59	3,50	2,45	3,23	0,96
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,65	4,64	5,44	0,34	0,22
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	11,20	2,44	2,94	1,78	1,27
4.a. Bangunan	6,06	2,37	3,93	2,93	0,22
4.b. Non-Bangunan	19,68	2,18	1,29	0,48	2,26
5. Perubahan Inventori	7,14	4,07	3,60	1,94	0,29
6. Ekspor Luar Negeri	10,84	-0,51	4,17	0,91	2,20
7. Impor Luar Negeri	8,48	3,02	2,08	0,19	(3,60)
PDRB	4,32	3,80	4,05	2,21	0,84

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

DAFTAR PUSTAKA

<https://nagekeokab.bps.go.id>

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. _____, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Profil Ekonomi Rumahtangga 1998*, Jakarta 1999.
5. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
6. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
7. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
8. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
9. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
10. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
11. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NAGEKEO**

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo
Mbay-Flores-NTT 86472

Homepage: <http://nagekeokab.bps.go.id> E-mail: bps5318@bps.go.id